

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2015. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- BPKP. 2016. Modul Sistem Keuangan Desa. Bogor : Pusdiklatwas BPKP
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.
- Hadi, N. F. (2018). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Halim. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hasanah, U. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun Tahun 2018-2020. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
- LAN RI. 2015. Akuntabilitas. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2, No.1.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Ombudsman Republik Indonesia. 2020. Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. Jakarta : Ombudsman RI
- Pemerintah Desa Gondowido
- Pemerintah Desa Pupus

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Syam, N. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Jombe Kecamatan Turatea. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahyudi, Nanang (2018). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Negeri 2 Lumajang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
- Wijayanti, Era. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk), Sistem Pengendalian Internal, Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Zikri, A. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(2), 141-156.